

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian**

Pesatnya perkembangan dunia usaha menyebabkan tingkat persaingan antar perusahaan semakin meningkat (Purnamawati, 2019). Salah satu segmen usaha yang sedang dikembangkan adalah UMKM. UMKM mempunyai peran dan kemampuan tinggi pada perekonomian bangsa serta menjadi pelopor dari sektor lainnya yaitu dapat meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional. Pekerjaan besar UMKM dalam perbaikan keuangan di Indonesia telah difokuskan pada penguatan UMKM dalam perekonomian dunia. UMKM adalah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam berbagai bidang usaha, yang menggabungkan kepentingan warga serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Hasanah, 2020).

Dengan perkembangan bisnis yang pesat, UMKM harus berdaya saing secara kompetitif. Jumlah UMKM di Indonesia tumbuh signifikan setiap tahunnya, pada tahun 2018 jumlah UMKM mencapai 64,2 juta, dan pada tahun 2019 jumlah UMKM mencapai 65,5 juta. Angka ini merupakan peningkatan sebesar 1,98% dibandingkan tahun sebelumnya. Diperkirakan jumlah peserta UMKM akan meningkat antara tahun 2020 dan 2021 . Pada tahun 2018, UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp5.721,1 triliun, tumbuh sebesar 22,9% menjadi Rp7.034,1 triliun pada tahun 2019. Kemudian, kontribusi UMKM terhadap PDB cukup signifikan yaitu sebesar 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan Rp. 8500 triliun pada tahun

2020 (Kementerian Koperasi dan UKM, 2023). Sebagian besar kontribusi terhadap negara berasal dari UMKM.

Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 38 provinsi yang ada. UMKM di Bali sangat dikenal oleh wisatawan lokal maupun mancanegara karena masyarakat Bali pada umumnya sangat kreatif dan inovatif. Pembangunan industri kecil maupun usaha kecil di Bali mempunyai potensi untuk dikembangkan mengingat pada dasarnya masyarakat Bali memiliki kreativitas yang tinggi yang cukup memberikan kontribusi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta dapat mendukung program pembangunan daerah (Agus Budiarta dan Trunajaya, 2013). Berikut adalah data perkembangan jumlah UMKM di masing-masing kabupaten yang ada di provinsi Bali.

Tabel 1.1  
Perkembangan UMKM di Provinsi Bali Tahun 2019 s/d 2022

No	Kabupaten	Jumlah UMKM			
		2019	2020	2021	2022
1	Buleleng	35.555	54.489	57.216	61.739
2	Jembrana	27.654	24.346	46.277	66.537
3	Tabanan	41.459	42.744	43.715	47.160
4	Badung	19.688	19.261	22.647	40.989
5	Denpasar	31.826	32.026	32.224	32.226
6	Gianyar	75.412	75.482	75.542	75.620
7	Bangli	44.068	44.068	44.123	44.175
8	Klungkung	11.761	14.584	35.792	36.072
9	Karangasem	39.589	40.468	57.456	40.614

Sumber: diskopukm.baliprov.go.id, Data Diolah Penulis (2023)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, Kabupaten Buleleng merupakan salah satu kabupaten yang ada di Bali dengan pertumbuhan UMKM yang terlihat stabil. Pertumbuhan jumlah UMKM di Indonesia tidak terlepas dari pertumbuhan berbagai daerah khususnya Kabupaten Buleleng. UMKM di Kabupaten Buleleng telah berkembang pesat dari tahun ke tahun. Berikut adalah data perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng.

Tabel 1.2  
Jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng Tahun 2019 s/d 2022

No	Klasifikasi Usaha	DATA UMKM							
		2019		2020		2021		2022	
		Formal	Informal	Formal	Informal	Formal	Informal	Formal	Informal
1	Usaha Mikro	5.114	20.934	5.709	38.961	7.007	40.304	7.505	43.250
2	Usaha Kecil	3.481	5.813	3.655	5.921	3.662	5.992	3.700	7.022
3	Usaha Menengah	192	4	217	9	225	9	235	10
4	Usaha Besar	17	-	17	-	17	-	17	-
<b>TOTAL</b>		<b>8.804</b>	<b>26.751</b>	<b>9.598</b>	<b>44.891</b>	<b>10.911</b>	<b>46.305</b>	<b>11.457</b>	<b>50.282</b>

Sumber:

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM Kab. Buleleng (2023)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menunjukkan adanya peningkatan pada jumlah UMKM yang tersebar di wilayah Kabupaten Buleleng. Meningkatnya jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng maka penerapan SAK EMKM semakin diperhatikan oleh pemilik UMKM. Dilihat dari fenomena saat ini, sebagian besar UMKM di Indonesia belum menyusun laporan keuangan dengan benar sesuai SAK EMKM. .

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan UMKM, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada 24 Oktober 2014, dan berlaku pada 1 Januari 2018 untuk membantu pelaku usaha menyusun laporan keuangan (DSAK IAI, 2016). Kunci keberhasilan suatu bisnis salah satunya bisa dipandang berdasarkan kecukupan pelaporan moneter (Herawati et al., 2019). Pembentukan SAK EMKM lebih sederhana dibandingkan SAK lainnya. Penerbitan SAK EMKM ini tentunya memudahkan para pelaku usaha untuk membuat laporan keuangan dengan cepat dan mudah. Berikut ini merupakan beberapa UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng yang diminta keterangan terkait penerapan SAK EMKM.

Tabel 1.3  
Data Observasi Awal UMKM di Kabupaten Buleleng

No.	Nama Usaha	Bidang Usaha	Alamat	Penerapan SAK EMKM
1.	Usaha Baja Ringan	Perdagangan	Jl. Wr. Supratman, Kel. Penarukan, Buleleng	Belum membuat laporan keuangan sesuai SAK EMKM
2.	Usaha Salon Kecantikan	Jasa	Jl. Ahmad Yani, Kaliuntu, Singaraja	Masih mencatat pembukuan dengan sederhana menggunakan nota, kwitansi.
3.	Usaha Bahan Bangunan	Perdagangan	Jl. Raya Kerobokan-Air Sanih, Buleleng	Belum menerapkan laporan keuangan sesuai standar akuntansi, pencatatan transaksi menggunakan pembukuan secara sederhana

Sumber: Data Diolah Penulis (2023)

Berdasarkan tabel 1.3 diatas, hasil observasi dan kunjungan ke beberapa pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng bahwa pelaku usaha hanya membuat pembukuan secara sederhana dan tidak sistematis, hanya mencatat apa yang dipahami seperti mencatat pendapatan dan beban-beban terhadap aktivitas operasi usahanya secara manual. Menurut Bapak Eky Gito Irwanto selaku *Assistant Relationship Manager* (ARM) di salah satu lembaga penyalur kredit memaparkan bahwa dalam pengajuan kredit harus ada laporan keuangan usaha yang menjadi syarat pemberian kredit. Tujuannya agar pihak pemberi kredit dapat menganalisa apakah usaha tersebut layak untuk diberikan modal dan harus bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena pelaku usaha tersebut belum membuat laporan keuangan yang jelas dan sistematis, hal tersebut menjadi pertimbangan oleh lembaga penyalur kredit memberikan tambahan untuk modal usaha bagi pelaku usaha.

*Stakeholder* merupakan sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, mengenai sifat saling mempengaruhi antara keduanya yang kompleks dan dinamis. *Stakeholder* dan organisasi saling mempengaruhi, hal ini dapat dilihat dari hubungan sosial keduanya yang berbentuk tanggung jawab. Oleh karena itu organisasi memiliki akuntabilitas terhadap *stakeholdernya*. Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*. Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* kepada perusahaan tersebut. Keberadaan *stakeholder* akan memberikan peran penting bagi UMKM. *Stakeholder* disini merujuk pada

karyawan, nasabah, pemerintah dan kreditur yaitu bank atau lembaga keuangan lainnya. Hal ini terkait dengan sumber daya ekonomi yang diberikan oleh *stakeholder* terhadap kegiatan usaha perusahaan, yang dapat berupa pinjaman, masukan atau nasihat kepada perusahaan, atau kebijakan pemerintah daerah.

Pertumbuhan UMKM yang cepat bukan bermakna UMKM tidak mempunyai kendala didalam melakukan usahanya. Salah satu kendala yang sering dihadapi pada setiap UMKM ialah kesulitan dalam perolehan modal serta penyajian laporan keuangan yang belum berdasarkan SAK EMKM. Penyajian laporan keuangan yang konsisten dengan SAK EMKM bisa dipergunakan sebagai proses pengajuan kredit ke Bank dan lembaga keuangan lainnya. Tetapi didalam penyajian laporan keuangan yang konsisten dengan SAK EMKM masih dirasakan sulit bagi para UMKM. Manajemen UMKM tidak memiliki kemampuan didalam menyajikan pelaporan keuangan yang konsisten dengan SAK EMKM, hal ini disebabkan karena manajemen tidak memahami mengenai SAK EMKM didalam penyajian pelaporan keuangan entitas yang dikelolanya (Afrizal Purba, 2019). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di beberapa UMKM yang terletak di Kabupaten Buleleng bahwa para pelaku UMKM mengalami kesulitan dalam memperoleh tambahan modal dari pinjaman Bank dan Lembaga Keuangan lainnya, hal ini dikarenakan para UMKM belum mempunyai laporan keuangan yang sesuai dengan SAK EMKM. Selain itu, pelaku usaha lainnya juga belum memahami akuntansi sehingga para UMKM mengalami kesulitan dalam melakukan pembukuan akuntansi sederhana dengan benar yang berakibatnya belum memahami dalam mengimplementasikan SAK EMKM.

Menurut Purba (2019) menyatakan bahwa laporan keuangan yang tidak disajikannya sesuai standar akuntansi dikarenakan terdapatnya kekurangan pemahaman mengenai pembukuan akuntansi, proses akuntansi yang rumit, serta adanya anggapan bahwa laporan akuntansi tidak merupakan hal yang utama bagi UMKM. Pemahaman akuntansi merupakan kompetensi seseorang dalam pemahaman serta mendalami tentang akuntansi sebagai ilmu maupun siklus akuntansi yang dimulai dari melaksanakan pencatatan bermacam-macam transaksi sampai dengan menyajikan laporan keuangan (Mahmudi, 2015). Menurut Novatiani *dkk.* (2019) Mengungkapkan bahwa pemahaman akuntansi semakin baik maka semakin berkualitas juga pelaporan keuangan UMKM. Dalam menyajikan sebuah laporan keuangan, pemahaman akuntansi memiliki peranan penting sebagai dasar dalam pemahaman guna mengimplementasikan SAK EMKM sehingga pelaksana UMKM bisa mencukupi administrasi keuangan usahanya (Linda, 2022). Kemudian, Pardita *dkk.* (2019) mengungkapkan bahwa pemahaman akuntansi memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM, yang menunjukkan semakin tinggi tingkat pemahaman akuntansi para pelaku UMKM maka semakin tinggi pula penerapan SAK EMKM pada UMKM. Sehingga disimpulkan oleh Parhusip & Herawati (2020) bahwa pemahaman akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM di Kota Malang, hal ini menjelaskan bahwa pemahaman akuntansi pada pelaku UMKM dapat memotivasi didalam mengimplementasikan standar akuntansi keuangan dalam usaha yang dijalankan.

Selain pemahaman akuntansi, faktor lain yang mempengaruhi penerapan SAK EMKM adalah sosialisasi. Menurut Silvia & Azmi (2019) menyampaikan

sosialisasi SAK EMKM merupakan jenis usaha yang harus dilakukan oleh IAI atau instansi lain yang terkait dengan data yang dapat diakses sejauh SAK EMKM untuk meningkatkannya. Sosialisasi berfungsi sebagai cara yang efektif untuk mengenalkan kepada para pelaku UMKM mengenai standar akuntansi yang berlaku saat ini yaitu SAK EMKM (Prawesti, 2014). Sosialisasi berdampak positif pada SAK ETAP sebab melalui sosialisasi penggiat UMKM dapat laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi (Sari, 2020). Sehingga dengan begitu pelaku UMKM dapat meningkatkan pencatatan laporan keuangannya untuk memenuhi syarat dalam perolehan bantuan dana dari pihak bank dan lembaga keuangan lainnya.

Menurut hasil penelitian Prawesti (2017) sosialisasi dilakukan sebagai sarana untuk mengenalkan penggiat UMKM dengan standar pembukuan yang sedang berjalan, khususnya SAK-EMKM. Sosialisasi SAK EMKM sangat penting bagi pelaku UMKM dalam menyelesaikan pembukuan. Sosialisasi yang terkonsentrasi akan berdampak pada pelaku UMKM untuk melaksanakan SAK EMKM (Teguh, 2022). SAK EMKM baru-baru ini didistribusikan, diperlukan kepada otoritas publik agar memberikan sosialisasi dengan penggiat UMKM di Indonesia. Termasuk di Kabupaten Buleleng yang pertumbuhan UMKM setiap tahunnya terus meningkat, sehingga penggiat UMKM di Kabupaten Buleleng memerlukan penanganan lebih dari otoritas untuk melakukan sosialisasi mengenai pentingnya laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Diperlukan adanya pengarahan pemanfaatan laporan keuangan berbasis SAK ETAP bagi pelaku usaha di bidang UMKM (Widyastuti, 2017). Menurut Hasil penelitian yang diperoleh Larasati & Farida (2021) melalui sosialisasi ini, diharapkan penggiat



UMKM dapat terus mengembangkan kualitasnya untuk terus memahami bagaimana menyiapkan laporan moneter terkait SAK EMKM.

Menurut Adryant dan Rita (2020) memperoleh hasil bahwa sosialisasi laporan keuangan berdampak positif signifikan pada penerapan SAK EMKM. Didukung oleh penelitian Christian (2020) yang menyebutkan sosialisasi berdampak positif pada pengimplementasian SAK EMKM. Namun, hasil lain ditemukan oleh Lathifah (2018) yang menemukan sosialisasi tidak berdampak pada penerapan SAK ETAP. Ini menunjukkan adanya *inconsistent* hasil penelitian mengenai penerapan SAK EMKM. Adanya *inconsistens* terkait dampak sosialisasi pada penerapan SAK EMKM menjadi landasan keinginan peneliti dalam menyelidiki kembali dampak sosialisasi pada penerapan SAK EMKM. Penggiat UMKM yang mengikuti persiapan atau sosialisasi terkait dengan pelaksanaan SAK EMKM yang berdaya mulai 1 Januari 2018. Sehingga sosialisasi terkait SAK EMKM sangat diperlukan agar pelaku UMKM dapat membuat dan menerapkan sesuai SAK EMKM. Oleh karenanya terasumsikan sosialisasi berdampak pada penerapan SAK EMKM.

Selain itu faktor lain yang mempengaruhi penerapan SAK EMKM adalah tingkat pendidikan pelaku usaha. Seseorang dalam menyusun laporan keuangan mengalami permasalahan yang dihadapi. Rudianto dan Siregar (2012) mengungkapkan bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi pandangan atau persepsi pelaku usaha mengenai pentingnya laporan keuangan bagi perkembangan usaha yaitu tingkat pendidikan terakhir. Tingkat pendidikan dapat mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Jika sumber daya manusia rendah, maka pengelolaan laporan keuangan yang ada di UMKM sangat berpengaruh terhadap

kemajuan suatu UMKM (Lohanda, 2017). Rendahnya kualitas SDM yang menyebabkan para pelaku usaha belum maksimal dalam menjalankan aktivitas usaha untuk membuat laporan keuangan usaha sehingga dapat mempengaruhi kapasitas usaha. Sumber daya manusia yang disebut sebagai *stakeholder* ini merupakan sumber daya manusia yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengembangan teknologi informasi di perusahaan. Kemampuan dan keahlian pemilik UMKM saat ini sangat ditentukan dari pendidikan yang pernah ditempuh baik secara formal maupun nonformal. Sehingga Arismawati (2017) mengungkapkan bahwa apabila tingkat pendidikan yang dimiliki pelaku UMKM rendah maka akan sulit dalam memahami dan menerapkan SAK EMKM. Akan tetapi apabila pelaku UMKM memiliki tingkat pendidikan yang tinggi maka akan semakin mudah dalam menerapkan SAK EMKM untuk usahanya. Hasil penelitian Dewi, Yuniarta, dan Wahyuni (2017) menyatakan bahwa tingkat pendidikan pemilik berpengaruh positif terhadap penggunaan SAK ETAP. Penelitian yang dilakukan oleh Kusuma dan Lutfiany (2018) menyatakan bahwa sosialisasi SAK EMKM, tingkat pendidikan pemilik, persepsi pelaku UMKM, dan pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap implementasi SAK EMKM. Kemudian hasil penelitian ini didukung oleh Zantika (2019) mengungkapkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap praktik penyusunan laporan keuangan.

Uraian di atas menunjukkan adanya perbedaan antara teori dengan hasil penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti tertarik untuk menambahkan variabel independen yaitu pemahaman akuntansi dan menghilangkan variabel dari penelitian sebelumnya yaitu pemahaman teknologi

informasi. Selain bertambahnya jumlah variabel bebas dalam penelitian ini, sampel yang digunakan juga mengalami perubahan. Sampel penelitian sebelumnya menargetkan UKM. Oleh karena itu, dalam penelitian ini pemutakhiran sampel yang digunakan menyasar (UMKM) di Kabupaten Buleleng. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, suatu usaha diklasifikasikan sebagai usaha mikro jika omzet tahunannya tidak melebihi Rp300 juta, dan sebagai usaha kecil jika omzet tahunannya kurang dari Rp2,5 miliar. Sedangkan untuk usaha menengah, batasnya adalah yang memiliki omzet tahunan antara Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar (Purba et al., 2021).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengajukan sebuah penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Sosialisasi, dan Tingkat Pendidikan Pelaku Usaha Terhadap Penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kabupaten Buleleng”**

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut:

1. Terjadi peningkatan jumlah UMKM pada tahun 2018 sampai tahun 2021 di Kabupaten Buleleng dan diduga pada tahun 2022 persaingan akan semakin kompetitif.
2. Rendahnya pemahaman dan pengetahuan pemilik UMKM di Kabupaten Buleleng tentang pemahaman akuntansi.
3. Tingkat pendidikan pelaku UMKM yang sebagian besar merupakan lulusan SMA/SMK/MA/yang sederajat, menjadi salah satu kendala dalam menerapkan SAK-EMKM.

4. Kurangnya sosialisasi terkait penerapan SAK EMKM dalam membuat laporan keuangan untuk pelaku UMKM, sehingga pelaku UMKM mengalami kendala dalam membuat laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Sosialisasi sangat diperlukan untuk penambahan informasi dalam membuat laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.
5. Pemilik UMKM kesulitan memperoleh pinjaman dana kepada lembaga penyalur kredit untuk tambahan modal usaha.
6. Terjadi perbedaan hasil penelitian terdahulu antara variabel pemahaman akuntansi, sosialisasi, dan tingkat pendidikan pelaku usaha terhadap penerapan SAK EMKM.
7. Variabel seperti pemahaman akuntansi, sosialisasi, dan tingkat pendidikan pelaku usaha terhadap penerapan SAK EMKM untuk UMKM berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya.

### **1.3 Pembatasan Masalah Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka perlu untuk membatasi masalah yang akan diteliti. Hal ini agar penelitian lebih fokus pada topik yang memang menjadi isu utama, dan menghindari perluasan cakupan pertanyaan. Kajian ini dibatasi untuk memahami pengaruh pemahaman akuntansi, sosialisasi, dan tingkat pendidikan pelaku usaha terhadap penerapan SAK EMKM oleh UMKM di Kabupaten Buleleng.

### **1.4 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pemahaman akuntansi terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM?
2. Bagaimana pengaruh sosialisasi terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pendidikan pelaku usaha terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM?
4. Bagaimana pengaruh pemahaman akuntansi, sosialisasi, dan tingkat pendidikan pelaku usaha terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi terhadap penerapan SAK EMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi terhadap penerapan SAK EMKM.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan pelaku usaha terhadap penerapan SAK EMKM.
4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi, sosialisasi, dan tingkat pendidikan pelaku usaha terhadap penerapan SAK EMKM.

### **1.6 Manfaat Hasil Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyalurkan sumber pengetahuan dalam pengembangan ilmu di bidang akuntansi khususnya tentang pengaruh

pemahaman akuntansi, sosialisasi, dan tingkat pendidikan pelaku usaha terhadap penerapan SAK EMKM.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemilik UMKM

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh pelaku UMKM sebagai bahan atau dasar pertimbangan dalam membuat laporan keuangan dengan menerapkan SAK EMKM.

### b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu pemerintah dalam melakukan penetapan keputusan yang mana membangun bagi pelaku UMKM

### c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi atau bahan bacaan di bidang ekonomi khususnya akuntansi dan mendorong dilakukannya penelitian selanjutnya agar dapat mengembangkan serta mengetahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi penerapan SAK EMKM pada UMKM

